

**LAPORAN MONITORING EVALUASI DAN
TINDAK LANJUT PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN
SEMESTER II TAHUN 2025**



**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia- Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Monev dan Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan lingkup BPBAT Tatelu.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami atas terlaksananya penanganan benturan kepentingan lingkup BPBAT Tatelu. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkup BPBAT Tatelu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan atau implementasi dari penanganan benturan kepentingan dalam rangka mendukung Reformasi dan Birokrasi.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dan sebagai bahan masukan dalam peningkatan kinerja dan semangat reformasi dan birokrasi di BPBAT Tatelu. Dan juga dapat digunakan sebagai alat dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Tatelu, 30 Desember 2025
Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar
Tatelu



Christian Maikel Eman, S.IK., M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BPBAT Tatelu, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah suatu situasi dimana pejabat atau pegawai di lingkup BPBAT Tatelu memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Penanganan benturan kepentingan mencakup seluruh elemen strategis yang berada di lingkungan instansi dan mengatur penanganan konflik kepentingan, antara lain terhadap Pengelola Keuangan dan Pejabat yang menangani Pengadaan Barang/Jasa. Dengan maksud untuk selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum, peraturan perundang-undangan mengindahkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan berusaha menghindari tindakan perilaku ataupun perbuatan yang menimbulkan benturan kepentingan korupsi, maupun nepotisme (KKN), Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu bersungguh-sungguh dan konsistensi melaksanakan dari penanganan benturan kepentingan untuk memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih dan baik dengan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta berkeadilan.

1.2. Tujuan

- a. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan benturan kepentingan dari pihak internal maupun eksternal BPBAT Tatelu.
- b. Meningkatkan upaya pencegahan benturan kepentingan di lingkungan BPBAT Tatelu
- c. Mendorong pegawai di lingkup BPBAT Tatelu agar bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari laporan ini adalah kegiatan implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPBAT Tatelu secara berkala.

1.4. Dasar Hukum

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keputusan Kepala BPBAT Tatelu Nomor B.139/SP/BPBAT-T/KP.440/I/2025 tentang Penetapan Tim Penanganan Benturan Kepentingan.

BAB II

IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

BPBAT Tatelu telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut:

1. Himbauan larangan gratifikasi pada perayaan hari raya agama, pada media sosial BPBAT Tatelu
2. Penyusunan matrik identifikasi benturan kepentingan lingkup BPBAT Tatelu
3. Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan
 - a. Sosialisasi benturan kepentingan kepada seluruh pegawai BPBAT Tatelu
 - b. Sosialisasi eksternal benturan kepentingan melalui sosial media
 - c. Sosialisasi internal penanganan benturan kepentingan yang diikuti oleh seluruh pegawai BPBAT Tatelu baik secara tatap muka maupun secara offline.

BAB III

Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan di BPBAT Tatelu pada Semester I tahun 2025 tidak ditemukan adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di lingkup BPBAT Tatelu. Secara detail evaluasi atas penanganan benturan kepentingan berdasarkan bentuk *Conflict of Interest* sebagai berikut:

a. Gratifikasi

Penanganan benturan kepentingan dalam bentuk gratifikasi telah direalisasikan strategi penanganannya dengan telah dilaksanakannya :

- Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan ppada tanggal 30 Juni 2025.
- Internalisasi Kode Etik pada saat apel Senin
- LHKPN telah dilaporkan sesuai waktu yang ditentukan

b. Penggunaan Aset (BMN)

Penanganan benturan kepentingan dalam bentuk penyalahgunaan aset telah direalisasikan strategi penanganannya dengan kegiatan Internalisasi Kode Etik telah dilaksanakan pada saat apel Senin dan penerapan SOP Peminjaman Kendaraan Dinas.

c. Rahasia Jabatan / Instansi

Strategi penanganan bentuk benturan kepentingan Rahasia Jabatan telah direalisasikan dengan cara Internalisasi Kode Etik telah dilaksanakan pada saat apel Senin

d. Perangkapan Jabatan

Strategi penanganan bentuk benturan kepentingan Perangkapan Jabatan dilakukan dengan cara Internalisasi Kode Etik dan pelaporan gratifikasi. Intenalisasi Kode Etik telah dilaksanakan pada saat apel Senin, sedangkan pelaporan gratifikasi tidak dilaksanakan karena tidak adanya gratifikasi yang terjadi di lingkungan BPBAT Tatelu.

e. Rekrutmen Pegawai

Pegawai yang berpotensi terlibat benturan kepentingan dalam bentuk rekrutmen pegawai adalah Kepala Balai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, strategi penanganannya adalah dengan cara penandatanganan Pakta Integritas dan hal tersebut telah dilaksanakan pada awal tahun 2025.

f. Penyalahgunaan Jabatan

Realisasi penanganan bentuk benturan kepentingan Penyalahgunaan Jabatan dilakukan dengan cara penandatanganan Pakta Integritas yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025.

g. Hubungan Afiliasi

Bentuk benturan kepentingan Hubungan Afiliasi telah diimplementasikan dengan tindakan penandatanganan Pakta Integritas dan penempatan pegawai yang mempunyai hubungan kekerabatan di lokasi kerja yang berbeda.

h. *Moonlighting* (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya)

Strategi benturan kepentingan dalam bentuk *Moonlighting* atau bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya dilakukan dengan cara internalisasi kode etik pada saat apel Senin.

BAB IV

Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

1. Telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala baik melalui media sosial maupun sosialisasi internal tatap muka untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dimasa datang, serta meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, dalam hal ini BPBAT Tatelu.
2. Telah dilakukan identifikasi penanganan benturan kepentingan guna menyediakan mekanisme penanganan yang jelas bagi setiap indikasi benturan kepentingan yang muncul.
3. Menyusun SOP Penanganan Benturan Kepentingan.

Hasil monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel dibawah;

No	Uraian	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan	Tindak lanjut laporan
1.	Mendapatkan fasilitas/hadiah dari pihak ke III yang termasuk gratifikasi	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Penggunaan asset BMN di luar kedinasan	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Membocorkan rahasia kegiatan di BPBAT Tatelu	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Menjadi Tim dalam SK Pelaksanaan kegiatan di mitra kerja	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Mempengaruhi kaidah proses pengawasan dari hasil pekerjaan	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ke III baik langsung maupun tidak langsung.	Nihil	Nihil	Nihil

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan tindak lanjut dari rekomendasi pada monitoring dan evaluasi Semester I 2025.
2. Berdasarkan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan lingkup BPBAT Tatelu, tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, baik dalam pelayanan publik, pejabat pengelola keuangan maupun pejabat yang menangani pengadaan barang dan jasa

B. Saran / Rekomendasi

1. Tetap melaksanakan sosialisasi secara berkala seperti pembuatan infografis tentang benturan kepentingan.
2. Membuat survey kepada pegawai lingkup BPBAT Tatelu tentang pemahaman Benturan Kepentingan.

Tatelu, Desember 2025
Tim Penanganan Benturan Kepentingan (CoI)

BPBAT Tatelu



Jasmin J. Watung, Spi
NIP. 19720404 200003 1006

LAMPIRAN

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Pembangunan ZI WBK oleh Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada Forum Konsultasi Publik, Senin 30 Juni 2025



Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Pengaduan Masyarakat BPBAT Tate - PowerPoint (Product Activation Failed)

File Home Insert Design Transitions Animations Slide Show Review View Nitro Pro Tell me what you want to do... Sign in Share

Cut Copy Paste Format Painter Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing

1

PENGENDALIAN GRATIFIKASI, BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

Disampaikan oleh pada Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan BPBAT Tate 30 Juni 2025

2

Dasar Hukum

- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Perikanan
- UU No. 26 Tahun 2001 tentang Kelautan
- Peraturan BPBAT No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan BPBAT
- Peraturan BPBAT No. 18 Tahun 2021 tentang Peraturan BPBAT
- Peraturan BPBAT No. 19 Tahun 2021 tentang Peraturan BPBAT

3

Slide 1 of 14

Notes Comments 73%

30°C Cerah 1:51 PM 7/3/2025

**MATRIKS HASIL MONEV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
LINGKUP BPBAT TATELU TAHUN 2025**

No.	Bentuk & Jenis Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai Yang Terkait	Sumber	Penanganan	Upaya Keberhasilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pejabat atau pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya.	Pejabat dan Pegawai	1. Gratifikasi; 2. Kelemahan sistem organisasi.	Membuat Laporan adanya dugaan benturan kepentingan dengan disampaikan kepada Atasan Langsung;	1. Komitmen dan Keteladanan; 2. Perhatian khusus atas hal tertentu; 3. Menghindari situasi benturan kepentingan; 4. Pemantauan dan evaluasi.	Satuan kerja
2	Pejabat atau pegawai menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.	Pejabat dan Pegawai	1. Penyalahgunaan wewenang;			Satuan kerja
3	Pejabat atau pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.	Pejabat dan Pegawai	1. Penyalahgunaan wewenang; 2. Perangkapan jabatan;			
4	Pejabat atau pegawai dalam pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.	Pejabat dan Pegawai	1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan);			Satuan kerja
5	Pejabat atau pegawai menyalahgunakan jabatan.	Pimpinan dan Pejabat Terkait	1. Penyalahgunaan wewenang; 2. Kelemahan sistem organisasi.			
6	Pejabat atau pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.	Pimpinan satker	1. Penyalahgunaan wewenang; 2. Kelemahan sistem organisasi.			Satuan kerja
7	Kebijakan pejabat atau pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi.	Pimpinan, Pejabat Terkait	1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan); 2. Gratifikasi;			Pimpinan dan Pejabat
8	Pemberian izin dari pejabat atau pegawai yang diskriminatif.	Pimpinan dan Pejabat Terkait	1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan);			Subbag Umum dan Keuangan (Kesekretariatan)
9	Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah.	Pimpinan satker dan subbag umum	1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan);			
10	Pemilihan rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional.	Pejabat Barang dan Jasa	1. Penyalahgunaan wewenang; 2. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan); 3. Kelemahan sistem organisasi.			Pegawai Pelayanan Publik
11	Pejabat atau pegawai melakukan komersialisasi pelayanan publik.	Pejabat dan Pegawai Pelayanan Publik	1. Penyalahgunaan wewenang; 2. Kelemahan sistem organisasi.			
12	Pejabat atau pegawai menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.	Pejabat dan Pegawai	1. Penyalahgunaan wewenang; 2. Kelemahan sistem organisasi.			Seluruh pejabat dan pegawai pada satuan kerja
13	Pejabat atau pegawai menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.	Pejabat terkait	1. Perangkapan jabatan; 2. Penyalahgunaan wewenang;			Pejabat Penilai
14	Menjabat sebagai dewan direksi di suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya.	Pejabat dan Pegawai	1. Perangkapan jabatan;			Satuan kerja





